

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan menjadi salah satu upaya untuk memanusiakan manusia yang bertujuan menyiapkan individu agar menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, lebih cepat mengerti, dan siap dalam menghadapi arus perubahan serta perkembangan zaman. Sehingga, pendidikan menjadi upaya agar peningkatan kesejahteraan dapat terwujud.

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan dan pemerintah berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tanpa terkecuali. Hal tersebut ditegaskan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31 ayat 1.¹ Berdasarkan konstitusi tersebut maka, layanan dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah harus menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa adanya perbedaan dari segi apapun.

Pendidikan yang bermutu dapat ditempuh dengan berbagai jenis Pendidikan. Salah satunya yaitu melalui Pendidikan nonformal. Proses Pendidikan nonformal memiliki pengaruh yang sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana program yang dicanangkan tidak terlepas dari pengembangan bakat dan minat setiap individu.²

Pendidikan nonformal diselenggarakan untuk anggota masyarakat apabila membutuhkan layanan pendidikan yang lebih *fleksibel*, terarah, sesuai kebutuhan, dan tidak hanya membahas terkait teori, tetapi mampu memberikan dorongan atau motivasi bagi terjadinya transformasi pada diri peserta didik.³ Layanan pendidikan tersebut dapat digunakan untuk mendukung pendidikan berkelanjutan dan proses pengembangan kemampuan diri, ilmu, dan keterampilan dapat ditingkatkan guna menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh pihak lembaga baik swasta atau pemerintah

¹Trisna Wulandari, Isi Pasal 31 Ayat 1 - 5 UUD 1945 dan Hak Warga Negara Indonesia, 2022, (<https://www.detik.com/edu/detikpedia>), Diunduh tanggal 12 Desember 2022.

²Haerullah dan Elihami. Dimensi Perkembangan Pendidikan Formal dan Non Formal. *Jurnal Edukasi Nonformal*. 2020, h.194.

³Wahyu Bagja Sulfemi, Modul Manajemen Pendidikan Non Formal (2019), h. 5.

guna mejangkau Masyarakat lebih luas. Salah satu lembaga resmi pemerintahan yang turut menyediakan pendidikan nonformal yaitu Mahkamah Agung RI yang melakukan pengembangan dan penelitian di bidang hukum, pendidikan, dan pelatihan tenaga teknis dan administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI melalui Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI).

Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI memiliki salah satu unit kerja yang berfungsi untuk mewadahi para staf-staf serta pejabat dari setiap pengadilan yang ada di Indonesia maupun instansi-instansi lain yang bekerjasama dengan MA RI untuk mengembangkan kemampuan terkait kepemimpinan, administrasi, *softskill* dan lain, yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Menpim).

Pusdiklat Menpim menyelenggarakan berbagai pelatihan baik yang diselenggarakan sendiri atau bekerjasama dengan pihak atau lembaga lain. Program Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) nomor 5 Tahun 2014 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020.⁴

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Pusdiklat Menpim salah satunya yaitu dengan menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). PKP menjadi program pelatihan struktural kepemimpinan pengawas yang diatur dalam peraturan pemerintah terkait manajemen pegawai negeri sipil yang berfungsi sebagai wadah pengembangan kompetensi peserta guna memenuhi standar kompetensi manajerial Jabatan Pengawas.⁵ PKP memiliki tujuan agar akuntabilitas Jabatan Pengawas terjamin pelaksanaannya sehingga kemampuan dalam mengendalikan operasional pelayanan publik yang dilaksanakan dapat sesuai dengan standar yang berlaku.

⁴Joko Waluyo. Optimalisasi Peran Widyaiswara Dalam Meningkatkan Kompetensi Peserta Pelatihan. *Jurnal Honai*. 2021, Volume 3, Nomor 2, hh.12–24.

⁵LAN RI, Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial ASN (https://lan.go.id/?page_id=2147), Diakses 8 Juli 2023

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) memiliki beberapa mata pelatihan, salah satunya yaitu Pelayanan Publik Digital. Mata Pelatihan Pelayanan Publik Digital memberikan pemahaman mengenai konsep dan *trend* pelayanan publik pada era digital serta tantangan dalam implementasinya, sebagai bekal untuk melakukan inovasi dalam menghasilkan kualitas pelayanan publik yang baik dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan jabatan pada unit organisasi.

PKP menjadi sarana untuk para ASN dalam meningkatkan kompetensi agar dapat menjalankan tugas dengan maksimal. Peserta PKP merupakan orang dewasa yang sudah menduduki jabatan Eselon IV dan atau yang akan dipromosikan sebagai Eselon IV di satuannya masing-masing. Oleh karena itu, peserta pelatihan memiliki karakter atau sikap yang berbeda-beda berdasarkan pengalaman yang telah diperolehnya, namun memiliki persamaan pada karakteristik belajarnya.

Menurut Soedomo, karakteristik belajar orang dewasa dipengaruhi oleh dorongan internal, di mana motivasi timbul dari keinginan sendiri. Meskipun prosesnya tidak mudah, namun suasana belajar yang menarik dan menantang akan membantu mempertahankan motivasi belajar.⁶ Suasana belajar tersebut dapat diwujudkan dengan menggunakan metode dan media yang tepat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan orang dewasa.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dengan mewawancarai beberapa Widyaiswara di lingkungan Pusdiklat Menpim MA RI terkait dengan penggunaan media, mayoritas Widyaiswara masih menggunakan media pembelajaran yang monoton seperti modul dan *power point*. Hal tersebut karena adanya keterbatasan kemampuan serta waktu dari Widyaiswara untuk mengembangkan atau membuat media pembelajaran sendiri

Selain itu, kondisi pembelajaran dengan alokasi waktu pada mata pelatihan Pelayanan Publik Digital yang memerlukan 9 jam pelajaran akan membuat peserta pelatihan menjadi jenuh dan tidak fokus, jika tidak diimbangi dengan metode dan media pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan adanya inovasi yang dapat menyiasati permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu dengan membuat

⁶Durotul Yatimah dan Eliana Sari, *Andragogi di Dalam Keilmuan Pendidikan: Suatu Kajian Teori dan Implementasi* (Jombang: Detak Pustaka, 2022), h.6.

media video pembelajaran sebagai alat untuk membantu peserta pelatihan memahami konteks materi dengan lebih baik lagi.

Media video pembelajaran merupakan jenis media audio visual yang dapat memberikan banyak pengaruh dalam pembelajaran sehingga materi yang diterima mudah dipahami oleh peserta didik. Media pembelajaran dengan menggunakan video membuat peserta pelatihan lebih mudah memahami dan mengingat materi karena penggunaan lebih dari satu jenis indera. Kombinasi gambar, suara, dan teks dapat membantu mengilustrasikan konsep yang kompleks dengan lebih jelas dan menarik perhatian peserta pelatihan.

Mell Silberman mengemukakan bahwa pembelajaran visual dapat menaikkan ingatan dari 14% menjadi 38%. Selain itu, pada penelitian ini juga menunjukkan hingga 200% perbaikan bahasa ketika menggunakan media pembelajaran visual, serta waktu dalam penyampaian konsep berkurang sampai 40% untuk menambah presentasi verbal.⁷ Hal tersebut menegaskan bahwa pembelajaran akan menjadi lebih efektif dengan menggunakan video yang mampu memberikan konsep materi secara nyata dengan audio visual yang ditayangkan serta peserta akan semakin termotivasi dalam proses pembelajaran dan saling berdiskusi, bertukar pendapat mengenai pemahaman masing-masing peserta terhadap video pembelajaran yang ditayangkan, dengan begitu pembelajaran akan lebih hidup dan bervariasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan penelitian untuk merancang media video pembelajaran dengan judul “Pengembangan Media Video Pembelajaran Pada Materi Pelayanan Publik Digital Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Pusdiklat Manajemen Dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI” agar dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, sehingga sumber daya Aparatur Sipil Negara atau peserta pelatihan dapat memahami tugas dan perannya dengan baik.

⁷N.L.A Puspitawati. Penggunaan Youtube Sebagai Salah Satu Alternatif Media Pembelajaran Daring Bahasa Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*. 2022, Volume 11, Nomor 1, h. 98.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang Masalah yang diuraikan, maka dapat didapati identifikasi permasalahan dalam menyusun penelitian ini, yaitu:

1. Adanya kebutuhan dalam pengembangan media pembelajaran yang dapat menyiasati waktu pembelajaran yang panjang sehingga peserta dapat memahami materi dengan baik dan tidak jenuh.
2. Adanya kebutuhan dalam pengembangan media pembelajaran sebagai alat bantu widyaiswara dalam melakukan pengajaran dan pelatihan agar lebih variatif dan membantu peserta didik memahami konsep dari materi yang disajikan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan, maka penelitian ini difokuskan pada pengembangan media video pembelajaran pada materi pelayanan publik digital dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di lingkungan Pusdiklat Menpim MA RI.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Apakah pembuatan dan pengembangan video pembelajaran pada materi pelayanan publik digital dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di lingkungan Pusdiklat Menpim MA RI dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk banyak pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman dan pembelajaran bagi peneliti dalam mengembangkan media video pembelajaran serta turut berperan dalam menginovasi media video pembelajaran terhadap widyaiswara dan Pusdiklat Menpim MA RI.

2. Bagi Widyaiswara dan Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI

Dapat memanfaatkan hasil produk berupa video pembelajaran sebagai media pembelajaran dalam pelatihan sehingga pembelajaran dapat lebih bervariasi dan menarik.

3. Bagi Prodi Pendidikan Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan media video sebagai bentuk media pembelajaran.

